

ASSESSMENT PEMBELAJARAN IPS-EKONOMI DALAM SOROTAN

Nuryana

ABSTRAK

Rendahnya kualitas pendidikan nasional pada dasarnya disebabkan oleh banyak factor. Salah satu factor tersebut diantaranya ialah terletak pada implementasi penilaian pembelajaran. Sampai hari ini implementasi penilaian hasil pembelajaran disinyalir masih terdapat banyak kekeliruan, penyimpangan dan inkonsistensi pelaksanaan penilaian baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun analisis dan pengembangan penilaian. Untuk itu, guna merekonstruksi system penilaian hasil belajar ke depan yang lebih baik, maka perlu dilakukan upaya pembenahan dalam berbagai bidang seperti; meluruskan tolok ukur keberhasilan belajar atau pendidikan. Pencapaian prestasi atau hasil belajar peserta didik dipahami tidak hanya terfokus pada pencapaian aspek kuantitatif semata. Kebijakan yang diambil harus dapat dijaga dan diaktualisasikan keberadaannya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, perlu untuk ditegakkan suatu hukum (law inforcement). Sehingga, siapapun, kapanpun dan di manapun yang melanggar koridor-koridor penilaian pendidikan, kiranya dapat ditindak dengan seadil-adilnya.

Kata kunci: *Assessment, Acievement test, Pembelajaran, Guru*

PENDAHULUAN

Diskursus tentang kualitas pendidikan bangsa, sampai hari ini masih menarik untuk terus diperbincangkan. Persoalan kualitas pendidikan secara esensial sangat terkait dengan bagaimana upaya pembentukan sumber daya manusia berkualitas di masa depan. Itu sebabnya dalam berbagai kesempatan seminar, workshop, lokakarya, symposium dan forum-forum ilmiah lainnya, isu kualitas pendidikan selalu menjadi sorotan terutama dalam membahas tentang apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan serta bagaimana upaya untuk pemecahannya.

Menurut para ahli banyak hal sebetulnya yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan. Sebagaimana penuturan Suharsimi Arikunto (1994:6) misalnya, bahwa salah satu factor penyebab rendahnya kualitas pendidikan diantaranya ialah terletak pada implementasi penilaian dalam pendidikan. Dalam pendidikan kita, factor penilaian, terutama penilaian dalam pembelajaran, hingga sekarang dinilai masih belum memuaskan. Realitas menunjukkan bahwa penilaian dalam pembelajaran sampai hari ini cenderung masih terdapat banyak permasalahan. Ini terbukti misalnya,

dengan masih banyaknya terjadi kekeliruan, penyimpangan dan inkonsistensi pelaksanaan penilaian baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun analisis dan pengembangan penilaian.

Pada tataran realitas proses pembelajaran, pelaksanaan penilaian diduga masih terlalu *cognitif oriented*. Guru dalam menilai masih melakukan penilaian (*assessment*) dan pengukuran (*measurement*) secara parsial. Tiga ranah pendidikan sebagaimana ditawarkan Bloom yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotor masih kurang terfeleksikan secara komprehensif dalam proses dan penilaian pembelajaran. Bahkan menurut Suyanto dan Hisyam (2002:23) bahwa kondisi seperti ini nyaris terjadi dalam berbagai mata pelajaran dan jenjang pendidikan, termasuk penilaian dalam pembelajaran IPS Ekonomi. Secara nasional, dalam pelaksanaan penilaian disinyalir masih terfokus pada aspek kognitif semata.

Sementara itu pada sisi yang lain, kekeliruan, penyimpangan dan inkonsistensi pelaksanaan penilaian, terjadi pula pada proses pengambilan kebijakan (*policy*). Pengambilan kebijakan tentang system penilaian yang tidak disertai dengan pengamanan yang solid telah menjadikan ketetapan hukum begitu rapuh, sehingga dalam proses penyelenggaraan penilaian baik menyangkut penyusunan soal, pelaksanaan ujian, penskoran ataupun penentuan nilai, secara kasat mata masih diwarnai dengan berbagai macam intrik persoalan, seperti; korupsi, kolusi, nepotisme serta kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan lainnya.

Pada kalangan masyarakat, juga secara paradigmatik telah terjadi kekeliruan, penyimpangan dan inkonsistensi penilaian. Hal ini terlihat dengan terjadinya pengkaburan atau pembiasan makna terhadap esensi pendidikan yang sejati, sebagai akibat dari pemahaman yang salah terhadap penilaian hasil belajar. Di sini dapat dilihat, betapa hasil belajar peserta didik dipahami lebih sebagai perolehan dalam bentuk kuantitatif semata ketimbang perolehan berupa kualitatif dalam bentuk kemampuan yang harus dimiliki (Arief Rachman, 2003:200). Orang tua misalnya, ia lebih merasa bangga apabila anaknya dapat meraih nilai dengan angka yang tinggi. Kecuali itu, ia juga lebih terbiasa menanyakan pada anaknya dapat nilai berapa, ketimbang harus bertanya sudah bisa apa selama belajar di sekolah. Begitupun pihak sekolah, ia merasa lebih puas apabila dapat meluluskan siswa-siswanya dengan pencapaian nilai setinggi-tingginya. Walaupun, semuanya dilakukan dengan harus

mengorbankan sejumlah materi pembelajaran, yang sebenarnya justru lebih memiliki daya kreatifitas, inovasi dan kemandirian yang tinggi bagi keberhasilan belajar siswa.

Memperhatikan paparan di atas jelaslah bahwa persoalan pendidikan kita terutama pada aspek penilaian (*assessment*) demikian krusial untuk segera dipecahkan. Kelemahan-kelemahan yang ada pada sisi implementasi penilaian demikian penting untuk diformulasikan teknik dan strategi pemecahannya. Oleh karena itu, atas dasar pemikiran di atas maka dalam tulisan ini perlu dibahas tentang bagaimana implementasi penilaian dalam pembelajaran IPS Ekonomi. Untuk dapat membuat acuan bagi pengembangan aktualisasi penilaian ke depan, maka akan dibahas tentang retrospeksi penilaian dalam pembelajaran, yaitu dengan memberi sorotan pada seputar penyelenggaraan penilaian (*assessment*) masa lalu, dampak penilaian terhadap proses pembelajaran, persepsi masyarakat terhadap makna hasil belajar serta harapan terhadap system penilaian di hari depan.

PEMBAHASAN

Aktualisasi *Assessment* Pembelajaran Masa Lalu

Sebelum membahas tentang *assessment* masa depan, pada bagian ini terlebih dahulu akan dipaparkan tentang berbagai fenomena atau kasus yang terjadi pada masa lalu, terutama pada seputar pelaksanaan penilaian yang di dalamnya disinyalir cukup sarat dengan berbagai macam penyimpangan, kekeliruan dan tindak inkonsistensi pelaksanaan penilaian (*assessment*). Hal demikian penting untuk diungkap, sebab sebagaimana dinyatakan oleh **Pierelouis Manpertius Futuris** dari Prancis, yang dikutip oleh **Harold G. Shane** bahwa;" Cara utama untuk meramalkan masa depan ialah dengan jalan mengambil manfaat dari keadaan sekarang untuk mengetahui konsekuensi yang paling mungkin untuk masa depan" (Darmaningtyas, 1999:151).

Sejalan dengan pernyataan Pierelouis tersebut, maka dalam konteks perbaikan atau penyempurnaan terhadap system penilaian hasil belajar ini, agar kemudian dapat mengidentifikasi aspek-aspek mana saja yang baik dan patut dipertahankan serta aspek-aspek mana saja yang buruk kemudian perlu dihilangkan, dengan demikian, upaya perenungan terhadap apa yang telah terjadi pada masa lalu menjadi penting untuk senantiasa diaktualisasikan. Dalam upaya membuat catatan-catatan ini, sorotan akan lebih diorientasikan pada persoalan-persoalan yang *up to date* dan bersifat faktual, terutama, kasus-kasus yang diasumsikan sebagai penyebab bagi rendahnya

kualitas penilaian termasuk dalam pembelajaran IPS Ekonomi dan sekaligus gagalnya pendidikan.

Beberapa kasus dimaksud, antara lain; *Pertama*, menyangkut kasus tentang pengambilan kebijakan seputar penilaian. Terkait dengan persoalan kebijakan penilaian, dalam implementasi di lapangan ternyata tidak sedikit ditemukan berbagai macam kerancuan dan persoalan. Sebagai bukti ialah sebagaimana sistim penilaian yang dibuat bak "bola pingpong" misalnya. Dari sistim penilaian Cawu ke Semester, Semester ke Cawu dan kini dari Cawu ke Semester lagi.

Hemat penulis, hal tersebut dilihat dari sisi semangat untuk perbaikan atau penyempurnaan demi efisiensi administrasi, pembiayaan, waktu, dan menekan stress berat bagi siswa serta maksud-maksud lainnya dalam penilaian, memang patut diakui kebaikannya. Akan tetapi, bila dilihat dari perubahan kebijakan yang terlalu sering, namun berkelindan dalam hal-hal itu juga. Sementara, informasi hasil yang diperoleh selalu saja tidak menggembirakan, maka hemat penulis, hal demikian tidaklah lain kecuali hanya akan memberi kesan bahwa konsep yang dibuat selama ini seolah memang tidak pernah beres, cocok dan selesai dalam aplikasinya. Begitu banyak konsep-konsep yang telah dicetuskan, namun hanya sedikit saja yang mampu direalisasikan. Bahkan, dalam suatu kenyataan terbukti bahwa belum tuntas terevaluasi dari suatu konsep yang satu sudah disusul dengan konsep-konsep berikutnya. Meskipun, konsep yang baru sesungguhnya masih belum juga dipahami dan teruji secara benar.

Itulah persoalan dalam dunia pendidikan kita, yang nampaknya sederhana namun cukup memberi pengaruh bagi keberlangsungan pendidikan. Menurut beberapa asumsi, terjadinya persoalan sebagaimana di atas dimaksud paling tidak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; (a) boleh jadi bahwa gagalnya realisasi konsep pendidikan di lapangan tersebut disebabkan karena diantara pemerintah sebagai *policy maker* dan para pelaksana pada tingkat operasional di lapangan tidak terjadi suatu kesepemahaman yang benar-benar *convergence*, (b) pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah kurang begitu mempertimbangan aspek-aspek empiris di lapangan, sehingga persoalan-persoalan mendasar yang menjadi isu di lapangan cenderung tidak terjewantahkan dalam kebijakan, dan (c) sumber daya manusia yang menjadi pelaku terhadap pendidikan tersebut, etos kerjanya demikian rendah, sehingga disodori konsep bagaimanapun hebatnya, seolah selalu saja tidak

pernah siap, tidak pernah cocok, bahkan tidak pernah beres dalam pengaplikasiannya. Wal hasil, akibat dari tidak terciptanya sinkronisasi antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Sehingga, lagi-lagi upaya pendidikan tidak lebih, kecuali hanya sekadar konsep dan retorika belaka.

Kedua, kasus tentang pelaksanaan ebtanas. Sebagaimana disinyalir oleh Khoe Yao Tung (2002:11) bahwa dalam suatu kasus pelaksanaan EBTANAS kemarin misalnya, yang dianggap sebagai kenduri dunia pendidikan nasional. Ternyata, dalam realitas begitu banyak terdapat kekeliruan, penyimpangan dan inkonsistensi pelaksanaan penilaian. Praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang mewarnai dalam pelaksanaan penilaian nampak begitu kentara dan marak terjadi.

Khoe Yao Tung menyebutkan (Ibid h. 11), bahwa mulai dari pembengkakan biaya panitia, administrasi keikutsertaan ebtanas bagi siswa swasta, kasus "kejar setoran pengawas" yang mendatangi sekolah-sekolah swasta yang sedang mengadakan ebtanas, kasus pembocoran soal ebtanas, tidak valid dan reliabelnya soal, salah hitung nilai, tidak akuratnya soal, memperjualbelikan nilai hingga manipulasi nilai. Semuanya memperlihatkan bahwa betapa system penilaian pendidikan kita, terutama dalam penilaian hasil belajar selama ini benar-benar telah menghancurkan visi dan misi pendidikan sesungguhnya.

Penilaian hasil belajar yang dituangkan dalam bentuk ebtanas, ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ebtanas yang seharusnya berfungsi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan hasil belajar siswa, di mana dalam praktiknya sarat dengan muatan objektifitas, kejujuran, keterbukaan, validasi yang dapat dipertanggung jawabkan, ekonomis, efisien dan lain-lainnya. Namun, dalam realisasi ternyata justru terjadi distorsi terhadap norma-norma penilaian itu sendiri. Penilaian hasil belajar dalam bentuk ebtanas, yang seharusnya menjadi juru penegak keadilan dan simbol kejujuran, tetapi ternyata justru menjadi ladang sekaligus sarang bagi oknum-oknum tertentu yang sudah biasa memanfaatkan media pendidikan sebagai ajang meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Ki Supriyoko (2000) dalam sebuah tulisannya menegaskan bahwa pendidikan bukanlah medan yang cocok untuk mencari keuntungan finansial dengan cara-cara yang naif, salah dan menghalalkan segala cara. Pendidikan hendaknya harus terbebas dari kelompok-kelompok oportunistis yang hanya memanfaatkan kesempatan sesaat untuk kepentingan kelompok atau perseorangan. Dengan demikian, dalam penilaian

hasil belajar, baik pada tataran makro (*centre of policy*) maupun mikro (tingkat operasional pelaksana kebijakan) di bidang pendidikan hendaknya harus terbebas dari penyimpangan-penyimpangan penilaian. Seyogyanya harus lebih mengedepankan nilai moral dan etika dalam aplikasi penilaian hasil belajar. Persoalan jual beli nilai, manipulasi nilai dan praktik-praktik semacamnya yang terjadi baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah ataupun perguruan tinggi, hendaknya harus dikikis habis hingga ke akar-akarnya. Sebab, bila tidak maka dikhawatirkan bahwa pendidikan yang semula memiliki misi untuk membentuk SDM manusia yang berkualitas, namun kemudian justru hanya akan menjadi sumber bagi lahirnya manusia-manusia bermental rendah, tidak berbudi dan lemah semangat baik dalam membangun nilai-nilai kejujuran, keadilan atau bahkan peradaban.

Ketiga, kasus tentang penyusunan soal yang secara procedural masih belum mencerminkan rambu-rambu yang benar. Sebagaimana ditunjukkan oleh banyak ahli, bahwa butir-butir soal yang dibuat oleh para guru kita, bahkan hingga sekarang cenderung masih lebih banyak teraksentuasi pada aspek kognitif. Sementara, aspek afektif dan psikomotor nampak kurang mendapatkan tempat dan porsi yang memadai. Suharsimi (1994) misalnya menuturkan, bahwa akibat penilaian yang terlalu kognitif, kurang menyentuh aspek afektif dan psikomotor, sehingga hasil belajar yang didapat tidaklah signifikan. Kongkritnya, *output* pendidikan atau para lulusan kita hanya menguasai teori, tetapi tidak terampil melakukan pekerjaan keterampilan, juga tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan yang sudah mereka kuasai. Begitupun dalam aspek yang lain, karena lemahnya pembelajaran dan evaluasi terhadap aspek afektif, sehingga mengakibatkan merosotnya akhlak para lulusan, yang selanjutnya berdampak luas terhadap merosotnya akhlak bangsa.

Sehubungan dengan masih rendahnya kemampuan dalam menyusun soal sesuai dengan rambu-rambu yang benar tersebut, secara analitik kiranya dapat diungkap sebab-sebab kelemahan dalam beberapa hal, antara lain; (a) lemahnya kompetensi profesional guru di bidang penilaian. (b) lemahnya semangat akuntabilitas pada diri guru dan (c) lemahnya dukungan system secara positif

a. Lemahnya kompetensi profesional guru di bidang penilaian.

Akibat guru tidak menguasai bagaimana teknik-teknik penilaian yang baik dan benar, sehingga acapkali pelaksanaan penilaian yang dilakukannya masih terlalu jauh dari harapan, yakni dari standar kelayakan penilaian. Salah satu contoh

sederhana adalah teknik pembuatan soal atau penentuan format penilaian. Karena dasar kemampuan guru dalam teknik penilaian tersebut demikian rendah, sehingga seringkali bahwa soal-soal yang dibuat tidaklah mampu memerankan fungsi sebagaimana mestinya. Guru merasa kebingungan untuk dapat merumuskan format penilaian yang baik, yakni menilai terhadap apa yang harus dinilai serta mempertimbangkan factor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam penilaian.

b. Lemahnya akuntabilitas pada diri guru.

Akibat lemahnya semangat akuntabilitas pada diri guru, sehingga memungkinkan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan secara asal-asalan. Penilaian tidak dilakukan secara komprehensif yang meliputi keseluruhan aspek, seperti; aspek kognitif, afektif, psikomotor, social dan lain-lainnya. Penilaian dilakukan lebih bersifat *cognizance oriented*, dengan pertimbangan bahwa jika siswa mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh guru baik secara lisan maupun tulisan pada tataran kognitif, maka berarti bahwa proses pembelajaran telah berjalan secara efektif, demikian sebaliknya.

c. Lemahnya dukungan system secara positif

Sebagaimana banyak diungkap oleh para ahli dan praktisi di bidang pendidikan, bahwa sepanjang sistem pendidikan belum tertata secara menyeluruh dengan baik, maka kecil kemungkinan bahwa harapan dan target dalam pendidikan akan dapat diraih dengan baik pula. Ini artinya bahwa, betapapun guru telah berusaha untuk maksimal dalam melaksanakan pengajaran, terutama dalam melakukan penilaian. Namun, jika sisitemnya tidak mendukung secara positif, maka besar kemungkinan bahwa usaha yang dilakukan guru tersebut akan mengalami banyak kegagalan. Bahkan, boleh jadi jika iklim yang terbangun adalah justru iklim yang mengarah pada perilaku penyimpangan dan kekeliruan, secara langsung ataupun tidak guru dimungkinkan akan menjadi terkondisikan sebagaimana situasi yang terjadi, meskipun memang hal demikian tidak berarti pada semua guru.

Itulah beberapa fenomena bagian dari potret buram penyelenggaraan penilaian pembelajaran dalam pendidikan kita masa lalu, termasuk pembelajaran IPS Ekonomi, atau mungkin selama ini. Namun demikian, hal tersebut sebagaimana yang diuraikan, sesungguhnya hanyalah baru sekelumit. Sebab, selain apa yang diuraikan tersebut di

atas, sesungguhnya masih banyak lagi persoalan-persoalan lain seputar penyelenggaraan penilaian yang cenderung mengindikasikan terjadinya kekeliruan, penyimpangan dan tindak inkonsistensi dalam pelaksanaan penilaian, seperti; lemahnya tingkat validitas dan reliabilitas dalam penyusunan soal di kalangan para pengajar, tidak objektif, kurang terbuka, tidak efisien, tidak adil, tidak *fair* dan lain-lainnya yang mungkin terlalu luas untuk diungkap dalam tulisan yang singkat ini.

Dampak *Assessment* Terhadap Proses Pembelajaran IPS Ekonomi

Dampak *assessment* terhadap proses pembelajaran IPS Ekonomi, di sini perlu diberi ulasan agar mengetahui seberapa jauh sebenarnya pelaksanaan penilaian yang dilakukan telah memberi pengaruh bagi pelaksanaan pengajaran atau proses pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, penilaian dan pengajaran merupakan satu rangkaian yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya bersifat komplementer, yang secara simultan menjadi penentu bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembelajaran. Secara deskriptif bahkan Gronlund dalam Ngalim Purwanto (1994) menyatakan bahwa penilaian adalah: ... *a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils*". Maksudnya ialah bahwa penilaian sebagai suatu proses yang sistematis dilakukan untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa.

Menangkap dari apa yang tersirat pada pernyataan Gronlund tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa penilaian menjadi factor kunci bagi pengajaran. Artinya, bahwa semakin baik kualitas penilaian yang dilakukan, maka akan semakin baik pula dampaknya terhadap mutu pengajaran, demikian sebaliknya. Namun begitu, berdasarkan catatan yang ada bahwa dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar pada system pendidikan kita di lapangan, termasuk pada mata pelajaran IPS Ekonomi jenjang pendidikan dasar dan menengah masa lalu, lewat sistim penilaian berupa Ebtanas dengan parameternya berupa NEM, ternyata sedikit banyak telah memberi dampak bagi pelaksanaan proses pembelajaran.

Beberapa dampak tersebut antara lain; sebagaimana dikemukakan oleh Suyanto dan Hisyam (op cit h. 149), bahwa akibat dari "pendewaan terhadap NEM yang terlalu berlebihan", sehingga secara implicit telah membentuk suatu opini public. Yaitu, bahwa seolah NEM merupakan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pendidikan.

Berakar dari kekeliruan dalam memahami tolok ukur keberhasilan pendidikan atau pengajaran tersebut, sehingga kemudian secara signifikan berpengaruh terhadap paradigma sekolah dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, termasuk kegiatan pembelajaran IPS Ekonomi.

Sebagai bukti kongkritnya ialah sebagaimana ditunjukkan oleh Herwindo dan Safari (1993:8) bahwa kegiatan pembelajaran termasuk IPS Ekonomi di sekolah sesungguhnya cenderung lebih teraksentuasi pada pendekatan *drill* dan *role learning*. Atau lebih melakukan *rout learning* (hafalan) ketimbang penalaran. Aspek-aspek pembelajaran yang semestinya banyak menumbuhkan semangat kreatifitas, inovasi dan kemandirian yang tinggi, ternyata tidak begitu terefleksikan dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan, kegiatan pembelajaran yang justru lebih dikembangkan adalah menghafal dan latihan pengerjaan soal-soal. Penanaman sikap pada siswa untuk selalu mencari kebenaran kurang begitu diberikan, selain siswa selalu didoktrin agar menjadi benar. Atmosfir pembelajaran yang benar-benar mengarah pada ketercapaian hasil belajar kualitatif berupa kemampuan yang harus dimiliki kurang dapat diciptakan. Semua warga sekolah seolah terfokus pada satu titik, yakni bagaimana agar dapat sukses dalam ujian dengan indikator perolehan nilai setinggi-tingginya.

Kenyataan tersebut, menurut Darmaningtyas (1999) diduga telah terjadi semenjak pemberlakuan kurikulum 1975, yang secara substansial lebih terfokus pada hasil belajar siswa. Walaupun memang telah dilakukannya upaya penyempurnaan terhadap kurikulum, seperti kurikulum 1984 yang sedikit menggeser orientasi kegiatan belajar mengajar ke arah proses. Dan kurikulum 1994 yang secara filosofis sangat menaruh perhatian terhadap proses pembelajaran yang dinamis dan kontekstual. Tetapi, sebagaimana dituturkan oleh Suyanto dan Hisyam (*loc cit h. 148*) bahwa sebagian besar guru seolah telah merasa mapan dengan semangat kerja model kurikulum 1975 dan 1984. Di mana guru begitu *mekanistist* dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga persoalan kreatifitas masih saja terlantar dan tidak tersentuh oleh praksis pendidikan.

Bahkan, dalam penilaian dan penentuan hasil belajar pun yang terjadi adalah cenderung lebih berorientasi pada kuantitatif paradigma kognitif. Tiga ranah yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotor sebagaimana taksonomi yang ditawarkan **Bloom**, terlihat masih kurang mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan

pembelajaran, termasuk penilaiannya. Sedangkan, tolok ukur keberhasilan pendidikan atau pembelajaran yang digunakan adalah tolok ukur berstandarkan kuantitatif.

Itulah sebabnya mungkin, yang melatarbelakangi mengapa dalam hasil belajar (*output* atau *product*) yang diperoleh antara yang bersifat kuantitatif dan kualitatif berupa kemampuan, kemudian terjadi korelasi signifikan rendah atau bahkan korelasi nirsignifikan. Pencapaian nilai hasil belajar yang tinggi ternyata masih belum diiringi dengan bentuk kemampuan yang harus dimiliki. Sehingga, *output* ataupun *outcome* yang diperoleh sebagai hasil pendidikan adalah mereka yang memiliki daya inovasi, kreatifitas dan kemandirian yang rendah.

Persepsi Masyarakat Terhadap Makna Hasil Pembelajaran IPS Ekonomi

Sebagaimana pihak sekolah dalam memahami makna hasil belajar IPS Ekonomi, pada pihak orang tua pun atau masyarakat dalam memahami makna hasil belajar nampak telah mengalami suatu kekeliruan atau penyimpangan yang hampir sama. Misalnya saja, menurut Wijaya, dkk. (1992:123), bahwa dalam penilaian paling tidak mencakup dua hal penting yang harus diperhatikan. Yaitu, aspek kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif adalah penilaian yang berorientasi dalam bentuk angka-angka. Sedangkan, aspek kualitatif lebih berorientasi pada bentuk keterangan atau penjelasan dari kuantitatif. Bahkan, menurut Suyanto dan Hisyam (2001), bahwa aspek kualitatif lebih dimaknai sebagai bentuk kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik.

Namun demikian, sebagaimana yang terjadi dalam realitas di lapangan, terutama pada kalangan *stakeholders*, bahwa keberhasilan belajar siswa justru lebih berupa perolehan angka-angka (kuantitatif), ketimbang perolehan prestasi dalam bentuk kemampuan yang mencerminkan semangat kreatifitas, inovasi dan kemandirian yang tinggi. Masyarakat memandang bahwa peserta didik dinilai berhasil dalam mengikuti suatu program pendidikan apabila dapat meraih nilai dengan angka setinggi-tingginya. Sementara bila tidak, maka pelaksanaan pendidikan dapat diartikan masih jauh dari harapan atau belum mampu menyentuh dinding keberhasilan.

Oleh karenanya, akibat dari kekeliruan dalam memahami makna hasil belajar tersebut, sehingga para orang tua atau masyarakat, baik dalam bersikap ataupun memandang terhadap aspek-aspek pendidikan yang lain pun menjadi keliru pula. Hal demikian terlihat sebagaimana pada cerminan sikap, perilaku dan tanggapan orang tua

terhadap pembelajaran, antara lain; *Pertama*, orang tua dalam sepanjang mensekolahkan anaknya lebih merasa puas apabila anak-anaknya dapat meraih nilai (angka) yang tinggi. Begitupun, orang tua bisa menjadi marah ataupun sedih jika melihat anaknya gagal dalam ujian akibat perolehan nilai hasil tes yang kecil. Para orang tua, juga cenderung rela berkorban apa saja demi membela reputasi dan kehormatan nilai anak-anaknya. Orang tua acapkali bersentuhan dengan pembelaan terhadap anak-anaknya agar naik kelas, lulus ujian, dapat ranking bagus, diterima sekolah dan lain-lain. Meskipun hal demikian, tidak jarang pula harus memaksa para orang tua untuk bertindak korupsi, kolusi dan manipulasi, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi.

Kedua, akibat dari pemahaman yang keliru pada pihak orang tua atau masyarakat terhadap makna hasil belajar, sehingga keliru pula dalam memahami tolok ukur keberhasilan pembelajaran atau pendidikan. Hal demikian, sungguh berdampak buruk terhadap penilaian mutu suatu sekolah atau pendidikan secara keseluruhan. Orang tua atau masyarakat memandang bahwa mutu suatu sekolah adalah sangat tergantung pada bagaimana pencapaian suatu hasil belajar. Semakin baik hasil belajar secara rata-rata yang diperoleh, maka akan semakin baik pula mutu suatu sekolah itu.

Hal tersebut, bagi penilaian mutu suatu sekolah jelas sangat tidak *fair*. Sebab, dalam realitas, akibat persepsi yang keliru itu, kemudian memunculkan suatu *image* bahwa, "yang bonafid semakin bonafid, yang *underdog* semakin tertinggal jauh ke belakang". Pasalnya, suatu sekolah yang memang dasar inputnya rendah harus dirifalkan dengan sekolah yang dasar inputnya bagus. Sementara pada sisi lain, penilaian dan penentuan kualitas sekolah hanya dilihat pada hasil akhir belajar. Ini benar-nenar tidak adil dan tidak proporsional dalam konteks penilaian mutu suatu sekolah dari sudut pandang hasil belajar siswa. Meskipun fenomena seperti itu adalah kenyataan alamiah, bahwa siapa yang bisa membangun sistem dengan baik, maka dialah yang unggul.

Namun, untuk sekolah-sekolah seperti saat ini di negeri ini, yang kondisinya cukup menyedihkan. Jangankan untuk bersaing, bisa *survive* saja agar tidak bangkrut sudah untung. Apakah mungkin harus diganjar dengan opini publik yang membanding-bandingkan keberhasilan suatu sekolah dari segi hasil belajar berupa kuantitatif semata. Padahal, boleh jadi guru-guru di tempat lain, yang dasar inputnya rendah, tapi kinerja gurunya lebih tinggi dibanding sekolah yang konon faforit dengan

dasar input NEM tinggi misalnya. Dan fenomena seperti itu terjadi, sebenarnya tidak lain, kecuali sebagai akibat dari sistem yang dibangun selama ini. Yaitu, suatu persepsi; seolah tolok ukur keberhasilan terletak pada hasil belajar berupa angka-angka kuantitatif semata.

Oemar Hamalik (1994) menyatakan bahwa penilaian terhadap mutu pendidikan seyogyanya harus dilakukan terhadap komponen-komponen input, proses dan output pendidikan. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa dalam menentukan kualitas suatu sekolah hendaknya harus dilihat dari ketiga komponen tersebut. Yaitu, input, proses dan output. Sehingga dengan demikian, tidak lagi terjadi ketidak *fair-an* dalam menilai mutu suatu sekolah secara total.

Formulasi *Assessment* Pembelajaran IPS Ekonomi Masa Depan: Sebuah Harapan

Guna memformulasikan bagaimana aktualisasi *assessment* pembelajaran IPS Ekonomi ke depan, maka bahasan ini akan merujuk pada persoalan-persoalan seputar pelaksanaan penilaian pembelajaran masa lalu, yakni sebagaimana telah diuraikan yang meliputi beberapa pokok persoalan penting, seperti; (1) pengambilan kebijakan seputar penilaian yang kurang proporsional, (2) pengamanaan kebijakan yang terkesan lemah (3) teknik pelaksanaan penilaian yang cenderung nonprocedural, (4) dampak penilaian terhadap pembelajaran, dan (5) kekeliruan persepsi orang tua atau masyarakat terhadap makna hasil belajar.

Bertolak dari beberapa persoalan tersebut, maka di bawah ini akan dideskripsikan formulasi tentang bagaimana aktualisasi penilaian pembelajaran IPS Ekonomi masa depan, antara lain:

Pertama, menyangkut sistim pengambilan kebijakan yang harus lebih disempurnakan. Menurut Dunn (2000), bahwa dalam proses pembuatan kebijakan, secara garis besar paling tidak meliputi tahap-tahap; perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan penilaian. Sesuai dengan pendapat Dunn tersebut, maka dalam konteks pengambilan kebijakan tentang sistem penilaian hasil belajar ke depan, seyogyanya harus senantiasa berorientasi pada masalah-masalah masa lalu yang relevan. Yaitu, guna dilakukan identifikasi dan investigasi terhadap masalah-masalah tersebut. Mana hal-hal yang harus diperbaiki, disempurnakan, diganti atau dipertahankan dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, dapat dijadikan sebagai

acuan bagi perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan sistem penilaian di masa datang yang lebih baik.

Oleh karena itu, selaras dengan pendapat Dunn tersebut, maka dalam konteks perumusan masalah, peramalan dan rekomendasi, hendaknya apa yang ada dan terjadi di lapangan menjadi landasan pokok bagi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Apapun bentuknya seputar penilaian, entah berupa kegagalan, kerancuan, kekeliruan dan aspirasi-aspirasi stakeholder lainnya di lapangan, hendaknya menjadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan. Keterlibatan semua pihak, baik pemerintah itu sendiri, orang tua, masyarakat, sekolah ataupun kalangan *stakeholder* lainnya, dalam upaya pengambilan kebijakan hendaknya harus lebih dikedepankan. Pemerintah harus berani memberikan apresiasi penuh pada masyarakat atau orang tua dan sekolah untuk sama-sama terlibat di dalamnya. Sehingga dengan demikian, nantinya dalam pengambilan kebijakan tidak akan lagi terjadi kesenjangan (*gap*) antara pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan para pelaksana pada tingkat operasional. Dalam pengambilan kebijakan akan tercermin suatu nuansa baru yang benar-benar demokratis, tidak sepihak atau memaksakan kehendak, kecuali selalu mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang ada di bawah.

Dewasa ini, di era pemberlakuan otonomi daerah, di mana kewenangan pusat sebagian dilimpahkan ke daerah, sudah saatnya jika sistem pengambilan kebijakan seputar penilaian, dengan lebih mengedepankan *bottom up approach* daripada *top down approach*. Sehingga, kebijakan satu arah dari pusat ke daerah tidak lagi dijadikan sebagai pendekatan dalam pengambilan kebijakan. Hemat penulis, belakangan ini dengan bermunculannya berbagai konsep dalam dunia pendidikan, mulai dari kurikulum berbasis luas, kurikulum berbasis masyarakat, kurikulum berbasis sekolah, KBK, hingga lain-lainnya di bidang pendidikan, sebenarnya sudah mengarah pada adanya pemberdayaan potensi di daerah atau di bawah. Namun demikian, hal tersebut tentunya mudah-mudahan terhindar dari tendensi-tendensi tertentu yang hanya bermuatan formalitas dan retorika semata.

Kedua, berkaitan dengan pengamanan kebijakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Dunn di atas, bahwa suatu kebijakan agar senantiasa dapat dijaga dan dipelihara eksistensinya, maka perlu diadakan suatu pemantauan (*monitoring*) dan penilaian. Hal demikian dimaksudkan, agar kebijakan selain dapat direalisasikan dengan seoptimal mungkin, juga menjadi aman, karena terbebas dari berbagai macam bentuk kekeliruan,

penyimpangan dan inkonsistensi. Demikian halnya dalam kebijakan tentang sistem penilaian, agar dalam system penilaian terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi dan sebagainya yang merusak. Maka, perlu kiranya diadakan semacam pemantauan (controlling) dan penilaian. Hal ini dilakukan agar dalam system penilaian baik bersifat teknis maupun non teknis senantiasa dapat diaktualisasikan dan dijaga keamanannya dengan sebaik-baiknya.

Namun begitu, apa yang menjadi harapan tersebut, yakni dapat terealisasi dan terjaganya keamanan kebijakan pada seputar penilaian, kiranya akan dapat dimanifestasikan dengan baik apabila didukung dengan peraturan atau perundang-undangan yang jelas (Tilaar dalam Irene, 1999). Di mana, selain dengan pemantauan dan penilaian itu sendiri yang harus lebih dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan. Juga, lewat *law inforcement*, yakni penegakan hukum yang harus dilakukan dengan seadil-adilnya.

Dalam suatu upaya pemantauan dan penilaian di lapangan misalnya, jika kemudian didapati pelaku pendidikan yang berbuat salah dan menyimpang, semacam korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi dan sejenisnya. Maka, pemerintah atau pihak yang berwenang berkewajiban untuk menindak atau memberi sanksi terhadap oknum tertentu dengan seadil-adilnya. Pemegang kebijakan atau unsure-unsur pimpinan, dalam hal ini harus lebih proaktif dan punya keberanian untuk menindak tegas siapapun orangnya dan apapun modusnya yang berkaitan dengan penyimpangan atau pelanggaran pada seputar penilaian. Sebab, bila hal itu dibiarkan, berarti bukan saja benar-benar telah mengkhianati atau menodai kode etik yang ada, akan tetapi juga telah melakukan pelecehan intelektual yang sungguh-sungguh akan membuat stigma akademis.

Ketiga, proses komunikasi kebijakan yang harmonis. Komunikasi kebijakan yang harmonis ini penting artinya bagi kelancaran aktualisasi program. Sebagaimana disinyalir oleh Depdiknas (2002:32), bahwa dengan adanya komunikasi kebijakan melalui sosialisasi program atau arahan dan bimbingan tentang kebijakan pendidikan yang tepat dan jelas. Maka, sekolah dan masyarakat (stakeholder) dimungkinkan akan dengan mudah dapat menyesuaikan diri dan menerima sepenuhnya untuk melaksanakan kebijakan yang baru.

Oleh karena itu, dalam konteks system penilaian, agar tidak lagi terjadi kerancuan atau *complaint* pada tingkat operasional di lapangan. Terutama dalam implementasi

kebijakan, maka sosialisasi atau arahan dan bimbingan atas program yang dibuat adalah menjadi sangat penting untuk disampaikan dengan benar, tepat dan jelas. Sebab, dengan demikian, ketentuan-ketentuan tentang aturan main sistem penilaian, nantinya selain akan mudah dicerna juga dapat diaktualisasikan secara komitmen. Dan konsekwensinya kemudian, apapun yang menjadi ketentuan di dalam kebijakan akan menjadi milik bersama yang harus ditaati dan dijunjung tinggi secara bersama pula.

Keempat, teknik atau metode penilaian yang harus lebih dimantapkan. Guna merumuskan teknik penilaian secara praktis, terutama dalam proses pembelajaran, di sini dapat dipaparkan sebagaimana yang ditawarkan oleh Ngalim Purwanto (1994:5) meliputi:

1. Desain atau rancangan program penilaian yang lebih bersifat komprehensif
2. Perubahan tingkah laku individu sebagai dasar penilaian pertumbuhan dan perkembangan
3. Hasil penilaian yang harus teridentifikasi sedemikian rupa, sehingga memudahkan penafsirannya
4. Program penilaian yang berkesinambungan dan saling berkaitan (*interrelated*) dengan kurikulum

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan Ngalim Purwanto tersebut di atas, maka penilaian pembelajaran IPS Ekonomi ke depan agar lebih baik kiranya harus meliputi beberapa aspek penting. *Satu*, bahwa tujuan-tujuan umum yang akan dinilai hendaknya mencakup tidak hanya konsep, keterampilan dan pengetahuan. Tetapi juga, apresiasi, sikap, minat pemikiran kritis dan penyesuaian diri yang bersifat personal dan social. Suatu desain penilaian agar bersifat komprehensif, maka harus mencakup nilai-nilai dan tujuan pokok yang akan dicapai oleh sekolah tersebut bagi setiap individu peserta didik. Oleh karenanya, pendidik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing pertumbuhan dan perkembangan, hendaknya tidak saja dalam persoalan pengetahuan akademis (kognitif) semata, tetapi juga menyangkut pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, seperti; minat, apresiasi dan penyesuaiannya secara emosional dan social.

Dua, bahwa seluruh unsure perilaku peserta didik, baik itu intelektual, fisik, emosional dan social hendaknya harus senantiasa menjadi perhatian guru, terutama dalam situasi belajar. Tujuan dan harapan kurikulum sebagaimana yang tercermin pada

sejumlah perilaku peserta didik tersebut, hendaknya harus menjadi perhatian penting pula dalam penilaian. Sebab, bagaimana mungkin suatu tujuan dan harapan kurikulum yang begitu luas dapat tercapai, mengena pada sasaran sebagaimana yang diharapkan, apabila tidak diiringi dengan penilaian yang menyentuh berbagai aspek yang luas sebagaimana pada kurikulum.

Tiga, apa yang diperoleh sebagai data atau informasi dari hasil penilaian baik berupa kuantitatif maupun kualitatif, hendaknya harus diidentifikasi sedemikian rupa. Hal ini tentunya dapat dilakukan, misalnya dengan penskoran yang jelas, baik secara statistik, grafik ataupun verbal. Sehingga dari data penilaian tersebut tentang gambaran atau *performance* individu dapat dilihat dan dipahami secara mudah. Demikian pula, dapat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya serta dapat dilihat ke arah mana perkembangan individu peserta didik tersebut. Oleh karenanya, dalam interpretasi hasil penilaian, seorang pendidik harus melihat bagaimana hubungan antara skor-skor yang diperoleh peserta didik dalam tes-tes, dengan catatan-catatan kualitatif yang dibuat guru berupa *anecdotal records* misalnya (Masidjo, 1995).

Empat, penilaian dilakukan hendaknya secara berkesinambungan atau terus menerus. Ini penting artinya untuk memperoleh informasi secara integral-holistik dari perkembangan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, penilaian tidak lagi diartikan secara konservatif, yakni memandang bahwa penilaian berupa tes merupakan hasil akhir. Tetapi, pemahaman yang justru penting dikedepankan ialah bahwa penilaian melalui tes merupakan suatu bimbingan bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Oleh karenanya, memperhatikan paparan seputar penilaian sebagaimana tersebut di atas, maka ke depan penilaian diharapkan tidak lagi hanya terfokus pada nilai akhir berupa kuantitatif. Tanpa dihubungkan dengan kualitatif berupa kemampuan yang harus dimiliki. Tolok ukur keberhasilan suatu pembelajaran atau pendidikan hendaknya harus dilihat pada bagaimana pelaksanaan pembelajaran sebagai suatu system, tidak secara parsial.

Jadi, harapan ke depan, hemat penulis adalah bahwa dalam penilaian pembelajaran IPS Ekonomi atau pelulusan hendaknya tidak hanya terpasung pada hasil akhir belajar berupa tes tulis yang bernuansa kognitif semata. Akan tetapi, juga harus menyangkut keseluruhan aspek kemampuan siswa yang harus dinilai, baik afektif maupun psikomotor. Sehingga dengan demikian, teknik penilaian yang bersifat non tes

semacam penggunaan alat ukur; observasi, *Anecdotal Record*, *Check List*, *Rating Scale*, Angket atau Kuesioner, Interview atau Wawancara (Masidjo, 1995) menjadi penting untuk selalu diberdayakan. Di samping pula, non tulis yang harus diberi perhatian secara proporsional, selain tes tulis.

Seorang pengajar IPS Ekonomi harus mampu menilai siswa dalam sepanjang pembelajaran, untuk kemudian dijadikan sebagai bahan penilaian hasil belajar. Penilaian tidak dilakukan secara asal-asalan dengan hanya melihat hasil akhir semester atau mid semester saja. Akan tetapi, harus lebih mengedepankan penilaian yang sekiranya bisa membangun semangat kreatifitas, inovasi dan kemandirian yang tinggi bagi siswa. Misalnya, selain semester, mid semester, tugas terstruktur dan mandiri juga menilai aspek-aspek lain selama pembelajaran.

Untuk itu, dengan belakngan ini muncul berbagai konsep terbaru di bidang pendidikan, seperti; KBK (kurikulum berbasis kompetensi), life skill, ada lagi pembelajaran berbasis portofolio, dan lain-lainnya. Semua itu sebenarnya merupakan harapan baik yang patut dicermati oleh semua pihak dalam bidang pendidikan. Namun demikian, konsep-konsep tersebut nampaknya akan dapat terwujud dengan baik, apabila dalam mekanisme penilaian (*assessment*) disesuaikan dengan semangat konsep-konsep tersebut. Sebab, bila tidak maka pemunculan konsep KBK, portofolio, life skill dan semacamnya tidaklah lebih hanya sekedar replikasi dari system sebelumnya. Atau paling tidak, bagai dilepas kepalanya namun dipegang ekornya. Keinginan untuk merubah, tetapi seperti itu-itu pula pengaplikasiannya.

Melihat pada apa yang diuraikan di atas tersebut, maka bila saja strategi sebagaimana yang dimaksud dapat diaktualisasikan dengan baik. Kemungkinan, hasil belajar yang didapat nantinya adalah hasil belajar secara integral, yakni kuantitatif dan kualitatif berupa kemampuan riil yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Dan dampak kemudian adalah dengan sendirinya akan terbangun sebuah wacana baru di tengah-tengah *stakeholders* atau masyarakat luas bahwa tolok ukur keberhasilan belajar atau pendidikan tidak lagi hanya terletak pada pencapaian nilai angka-angka kuantitatif semata. Para orang tua atau masyarakat sebagai subsistem pendidikan tidak lagi salah memahami makna penilaian dan hasil belajar. Demikian pula, pihak sekolah dalam mengembangkan proses pembelajaran. Ia akan lebih bermuara pada pertimbangan untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan yang sifatnya dapat membangun kreatifitas, inovasi dan kemandirian yang tinggi bagi para siswa.

Semoga, harapan sebagaimana diungkap di atas, yaitu sebuah penyelenggaraan penilaian (*assessment*) ke depan yang lebih baik, kondusif dan proporsional dapat segera terwujud. Terutama melalui konsep-konsep baru di bidang pendidikan seperti sekarang ini, yakni; pemisahan antara tanda tamat belajar (STTB) dengan pelulusan (STK), kurikulum berbasis kompetensi (KBK), pembelajaran portofolio, life skill, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan.

PENUTUP

Akhir dari uraian ini, kiranya dapat ditarik benang merahnya bahwa sampai hari ini kualitas pendidikan bangsa masih juga belum menemukan suatu kepastian. Salah satu diantara penyebabnya diduga ialah karena rendahnya kualitas di bidang penilaian. Dalam penyelenggaraan penilaian masa lalu termasuk penilaian pembelajaran IPS Ekonomi, demikian banyak hal telah terjadi, baik berupa kekeliruan, penyimpangan ataupun inkonsistensi pelaksanaan penilaian.

Namun demikian, kenyataan tersebut tentunya akan dapat diatasi dengan baik apabila ada kemauan (*good will*) dari semua pihak untuk sama-sama merekonstruksi keberadaan sistemnya. Dengan satu ketentuan, bahwa perangkat penilaian pembelajaran harus lebih diproyeksikan secara komprehensif, mencakup; aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor, apresiasi, emosional, sosial dan lain-lain.

Sementara itu, hal lain yang tak kalah pentingnya juga harus diperhatikan ialah meluruskan tolok ukur keberhasilan belajar atau pendidikan. Pencapaian prestasi atau hasil belajar peserta didik dipahami tidak hanya terfokus pada pencapaian aspek kuantitatif semata. Demikian pula dalam pengamanaan kebijakan, agar kebijakan yang diambil senantiasa dapat dijaga dan diaktualisasikan keberadaannya dengan sebaik-baiknya, maka perlu kiranya untuk ditegakkan suatu hukum (*law enforcement*). Sehingga, siapapun, kapanpun dan di manapun yang melanggar koridor-koridor penilaian pendidikan, kiranya dapat ditindak dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Rachman, 2003. *"Mengurai Benang Kusut Pendidikan"*. Transformasi UNJ, Jakarta.
- Cece Wijaya, dkk, 1992. *"Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran"*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Chabib Thoha, 1994. *"Teknik Evaluasi Pendidikan"*. PT. Rajagrafindo, Jakarta
- Darmaningtyas, 1999. *"Pendidikan Pada Dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis"*. LPIST dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dunn, W.N., 2000. *"Public Policy Analysis : An Introduction"* (terjemahan S. Wibawa, dkk.) Gajah Mada University Press, Yogya, Cetakan IV
- Depdiknas, 2002. *"Mengembangkan Kebijakan Pendidikan Tingkat Kabupaten"*.
- Herwindo Haribowo dan Safari, 1993. *"Menjadi Penulis Soal Yang Bermutu Baik"*. Buletin Pengujian dan Penilaian, Agustus 1993, Jakarta.
- Irene Astuti, 1999. *"Reformasi Pendidikan Untuk Mengurangi Perilaku Anarki dan Menuju Masyarakat Madani"*. Cakrawala Pendidikan, Juni 1999, Thn. XVIII, NO 3
- Kaufman, Roger dan Susan Thomas, 1980. *"Evaluation Without Fear"*. United States of America, New York.
- Khoe Yao Tung, 2002. *"Simfoni Sedih Pendidikan Nasional"*. Abdi Tandur, Jakarta
- Ki Supriyoko, *"Seriuslah Membenahi Pendidikan"*. Kompas, 21 Agustus 2000, hal 4., Jakarta.
- Masidjo, 1995. *"Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah"*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Ngalim Purwanto, 1994. *"Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran"*. Penerbit Rosdakarya, Bandung.
- Oemar Hamalik, 1994. *"Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran"*. Penerbit Trigenda Karya, Bandung.
- Suyanto dan Hisyam Jihad, 2001. *"Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III"*. Adicita Karyanusa, Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 1999. *"Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan"*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 1988. *"Penilaian Program Pendidikan"*. Depdikbud Dirjen Dikti, Jakarta.
- Siti Irene A.D., 1999. *"Reformasi Pendidikan untuk Mengurangi Perilaku Anarkhi dan Menuju Masyarakat Madani"* Cakrawala Pendidikan, Juni Edisi XVIII No.3